



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IDA BAGUS PUTU ADINATHA
2. Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT
3. NHK : 711040

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 156.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 500.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 40.233.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 2.396.233.000

**III. HUTANG** Rp. 933.333.000

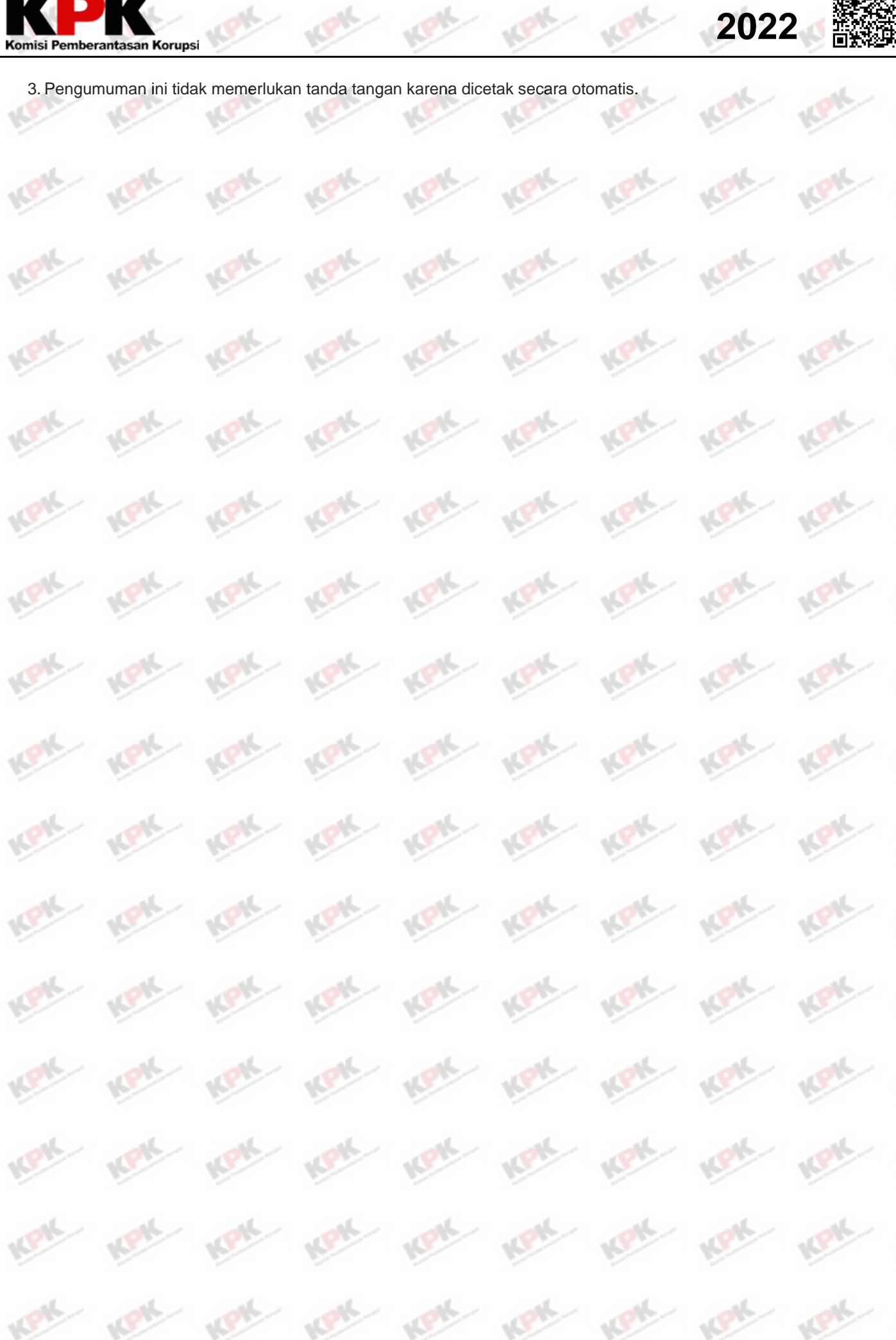
**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.462.900.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I GUSTI KETUT KARTIKA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
3. NHK : 884347

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 250.000.000

1. Tanah Seluas 410 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI  
Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 161 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL  
SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 170.093.400

1. MOTOR, HONDA F1C02N46L0/SOLO Tahun 2021, HASIL  
SENDIRI Rp. 11.848.200
2. MOTOR, HONDA F1C02N46L0/SOLO Tahun 2021, HASIL  
SENDIRI Rp. 11.848.200
3. MOTOR, YAMAHA B6H A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.  
19.897.000
4. MOBIL, HONDA BRIO E-SATYA MT Tahun 2016, HASIL SENDIRI  
Rp. 126.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 430.093.400**III. HUTANG** Rp. 25.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 405.093.400

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I MADE AJI SWARDHANA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU, DAN HUKUM
3. NHK : 693627

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>880.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>205.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>19.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>29.534.968</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.133.534.968</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>450.144.190</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>683.390.778</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NI LUH SUPRI CAHAYANI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUMAS
3. NHK : 522662

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	6.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	
4.000.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2004, HASIL SENDIRI	Rp.	
2.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERTAHAGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	6.016.700
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	12.016.700
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	250.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-237.983.300

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.